

MEMAHAMI MEDAN PELAYANAN GEREJA INDONESIA DEWASA INI (Tantangan menghadirkan Gereja gembira dan berbelaskasih)

Robertus Wijanarko SVD

Setiap zaman mempunyai narasi besarnya sendiri. Narasi besar merupakan wacana-wacana atau fenomena mencolok yang mempunyai pengaruh luas dan mendalam bagi kehidupan manusia, di manapun manusia itu tinggal. Gereja menyebutnya dengan ungkapan “tanda-tanda zaman”. Dokumen seruan Apostolik Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium*, dan Bula *Misericordiae Vultus* juga mempunyai konteks tersendiri dan dimaksudkan untuk memberi wawasan dan semangat baru kepada Gereja untuk menghadirkan diri dengan mengindahkan narasi-narasi besar tersebut. Mengingat referensi dokumen Kepausan adalah konteks Gereja Universal, maka wacana-wacana besar yang dirujuk merupakan kondisi masyarakat Global. Untuk konteks Gereja Indonesia, kita masih perlu mengidentifikasi narasi-narasi besar yang mempunyai pengaruh luas dan mendalam terhadap kehidupan kita, karena disanalah kita menemukan wajah dan apa yang dibutuhkan oleh manusia-manusia Indonesia.

Namun demikian perlulah kita menyimak terlebih dahulu fenomena zaman yang menjadi perhatian Gereja Universal, yang diidentifikasi dalam Anjuran Apostolik dan Bula Paus Fransiskus, baru kemudian kita mengidentifikasi narasi-narasi besar yang relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun, di era Globalisasi dewasa ini, sebenarnya tidak mungkin bagi kita untuk memisahkan keduanya.

TANTANGAN DUNIA DEWASA INI

a. *Kapitalisme Global*

Salah satu tantangan mencolok yang dihadapi oleh dunia dewasa ini

adalah kapitalisme global yang mengarah ke pola ekonomi pengecualian. Watak dasar dari Kapital adalah membiakkan diri. Itulah sebabnya ketika ruang lingkup Eropa dan kemudian Amerika Utara tidak memadai lagi untuk pembiakan kapital, dicari wilayah-wilayah baru sebagai medan pembiakan kapital (mencari sumber alam dan zona perdagangan). Munculah kemudian imperialisme dan kolonialisme.¹ Ketika era kolonialisme dan imperialisme berlalu, kebutuhan ruang untuk pembiakan kapital terus berlangsung, itulah sebabnya usaha-usaha untuk menjebol batas-batas teritori, ideologis, dan yuridis yang berusaha didesign oleh negara bangsa (nation-state) terus saja berlangsung. Dan inilah salah satu cara untuk membaca fenomena globalisasi, yaitu upaya untuk melakukan globalisasi terhadap pola ekonomi yang berbasis pada mekanisme kebebasan pasar dengan orientasi utama pembiakan modal.

Dalam perjalanan sejarah pembiakan kapital melalui pola ekonomi kapitalistik ini semakin kentara hanya mengabdikan pada kepentingan pemilik modal. Sementara pihak lain hanya terkalkulasi sebagai unsur produksi dan direduksi pada kebutuhan mengkonsumsinya. Konzern para pemilik modal hanya soal pembiakan modal, dengan tanpa mengindahkan sama sekali hak-hak dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Pemilik modal bisa dengan leluasa mengalihkan kapital mereka ke wilayah yang menjadi ranah subur pembiakan modal. Kapitalisme global semacam inilah yang menciptakan pola ekonomi pengecualian, karena sistem ekonomi hanya mengabdikan pada kepentingan golongan tertentu saja.²

Sistem ekonomi berbasis pasar bebas semacam ini, mentahtakan uang sebagai satu-satunya nilai yang berharga dalam kehidupan ini, tidak peduli akan terciptanya kesenjangan sosial-ekonomi yang terus melebar, dan menampik pentingnya etika dalam mengawasi pola ekonomi. Dengan demikian aneka aktivitas ekonomi dimaksudkan untuk menguasai aneka aspek kehidupan lain dari manusia, dan bukannya sebagai dimensi kehidupan yang mengabdikan pada peningkatan martabat hidup manusia.

1 Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: A Harvest Book, 1968), 135.

2 *Evangelii Gaudium*, 53 dan *Misericordiae Vultus*, 15.

b. *Kebudayaan yang terus berubah*

Seiring dengan perubahan kebutuhan hidup dan pola kehidupan ekonomi, kebudayaan manusia juga terus mengalami perubahan. Paus Fransiskus mengartikulasikan, “dalam budaya yang dominan dewasa ini, prioritas diberikan kepada hal yang lahiriah, langsung, terlihat, cepat, dangkal dan sementara.”³ Ungkapan tersebut menggarisbawahi pengaruh-pengaruh perkembangan teknologi digital dan komputer bagi terciptanya budaya virtual dan serba instant. Pengaruh teknologi digital dan komputer ini menggeser dominasi budaya tradisional yang memberi penghargaan terhadap sebuah proses. Selain itu Paus Fransiskus dalam dokumen itu juga mengidentifikasi proses perubahan budaya yang cepat dan silih berganti. Gerakan budaya yang baru muncul akan cepat diganti oleh cetusan budaya lain dan terus terjadi demikian.

Selanjutnya dokumen juga mencatat bahwa “di banyak negara globalisasi berarti kemerosotan yang berlangsung begitu cepat dari akar budaya mereka sendiri dan invasi cara berpikir dan bertindak yang dimiliki budaya lain yang secara ekonomi maju, tetapi secara etis lemah.”⁴ Dokumen mencatat pengaruh Globalisasi yang sangat besar terhadap perubahan kebudayaan. Proses Globalisasi merenggangkan ikatan primordian antara masyarakat dengan akar budaya mereka sendiri. Globalisasi yang sarat dengan kandungan ekonomi, telah mereduksi kebudayaan sebagai sarana untuk pengembangan kepentingan ekonomi, dan semakin meminggirkan kontribusi etis dari kebudayaan. Kebudayaan bermuatan ekonomis meminggirkan nilai-nilai tradisional, termasuk kesucian perkawinan dan kestabilan keluarga.

Lebih lanjut dokumen mencermati munculnya, di satu pihak, fundamentalisme, dan, di lain pihak, gerakan spiritualitas tanpa Allah. Dokumen mensinyalir bahwa gerakan fundamentalisme dan “new age” tersebut merupakan reaksi terhadap materialisme, konsumerisme, dan individualisme, serta tentu saja institusionalisme agama yang terlalu kuat.

3 Evangelii Gaudium, 62.

4 Evangelii Gaudium 62-63.

Namun pada saat yg sama gerakan tersebut juga “*mengeksploitasi kelemahan-kelemahan orang-orang yang hidup miskin dan di pinggiran masyarakat, orang-orang yang memenuhi kebutuhan di tengah-tengah penderitaan besar manusia dan mencari solusi langsung atas kebutuhan mereka.*”⁵

Terkait dengan identifikasi budaya yang terus berubah Evangelii Gaudium juga menyinggung fenomena sekularisme yang meminggirkan agama menjadi urusan pribadi. Dengan demikian fungsi etik dan profetik dari agama dalam mengontrol ruang publik dilemahkan. Demikian juga kontribusi agama dalam memandu proses perkembangan kebudayaan juga ditepikan.

c. Budaya Urban dan Multikulturalisme

Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk mencermati fenomena urbanisasi yang memunculkan kota-kota atau wilayah urban baru dan pusat-pusat hunian pekerja migran di banyak negara, dengan corak budaya baru yang multikultur dan kompleks. Budaya yang sama sekali baru telah lahir dan terus berkembang di kota-kota dan kantong-kantong pekerja migran, dimana narasi-narasi dan paradigma-paradigma baru sedang dibentuk. Paus Fransiskus menulis “*mereka menerima dari budaya-budaya ini bahasa-bahasa, simbol-simbol, pesan-pesan dan paradigma-paradigma baru yang mengajukan pendekatan-pendekatan baru akan kehidupan.*”⁶ Di wilayah-wilayah urban dan pekerja migran ini, sering kali generasi muda yang mulai terasing dari akar budaya mereka, mengalami disorientasi budaya, karena lingkungan hidup yang mereka huni juga sedang dalam proses mencari bentuk budaya-budaya yang menopang eksistensi mereka. Atau mereka mengalami adanya diskontinuitas antara nilai-nilai budaya yang mereka warisi, dengan nilai-nilai budaya baru yang mereka jumpai di lingkungan kehidupan mereka.

5 Evangelii Gaudium 63.

6 Evangelii Gaudium, 73.

Selain itu kontak dengan berbagai komunitas baru dengan latar belakang kebudayaan yang beragam, tidak dengan mudah membuat kohesitas sosial baru terbentuk. Ada periode dimana mereka harus mengalami konflik dan benturan yang kadang-kadang disertai kekerasan karena proses-proses tawar menawar untuk menentukan mana ragam budaya yang menjadi penafsir makna dan referensi dalam menjalin kehidupan bersama. Dengan kata lain, keadaan multikultur memang menyodorkan suatu perspektif baru, namun hal itu disertai dengan proses-proses negosiasi yang tidak selalu mudah.

MEDAN KEHADIRAN GEREJA KATOLIK DI INDONESIA

Negara kita Indonesia bukanlah negara yang terisolasi dari kancan dan dinamika kehidupan negara-negara lain di dunia. Karena itu fenomena Global juga mengalir ke wilayah negara kita. Walaupun demikian kita perlu mencermati narasi-narasi dominan yang secara khusus berpengaruh dalam kehidupan bangsa kita, utamanya yang terkait dengan upaya kita untuk menghadirkan peran Gereja yang gembira dan berbelaskasih. Sejauh penulis cermati, ada beberapa faktor penting yang mempunyai pengaruh terhadap situasi bangsa Indonesia: fakta bahwa kita masuk dalam pusaran proses Globalisasi; usaha yang terus berlangsung untuk membangun kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan yang diyakini khas dengan kondisi di Indonesia (demokrasi Pancasila); formalisme dan ritualisme agama; dan pengaruh pragmatisme-materialisme yang menyentuh hampir semua sektor kehidupan.

a. Bagian dari Masyarakat Global

Sebagaimana halnya semua negara di dunia, Indonesia juga tidak bisa mengisolasi diri dari proses globalisasi. Gejala ataupun proses sosial, ekonomi, politik, budaya, agama yang kait-mengkait, yang terjadi di wilayah tertentu dari dunia ini tentu punya implikasi yang serius terhadap kehidupan kita di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Globalisasi tak ubahnya merupakan intensifikasi keterjalanan antar negara.⁷ Dalam bidang ekonomi,

7 John Tomlinson, *Globalization and Culture* (Cambridge: Polity, 1999), 2.

misalnya, pola ekonomi kapitalisme liberal yang lahir dan berkembang di negara-negara maju, akhirnya juga harus diakomodasi oleh negara Indonesia.⁸ Kita sepertinya tidak bisa steril dari kekuatan pengaruh dari sistem ekonomi kapitalisme liberal ini. Ruang kita untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan berdasar Pancasila sangatlah sempit. Cita-cita untuk membangun sistem ekonomi Pancasila menjadi sebuah utopia. Karenanya, nilai-nilai yang tumbuh dalam pola ekonomi kapitalisme liberal, materialisme, konsumerisme, efisiensi, dan individualisme-kompetisi, juga akan menggenangi seluruh sektor kehidupan kita. Selain itu dalam sistem kehidupan ekonomi yang semakin condong ke kapitalisme liberal yang bertumpu pada mekanisme pasar, masyarakat kebanyakan kita hanya terhitung sebagai faktor produksi dan tereduksi sebagai konsumen. Kehidupan kebanyakan dari kita hanya akan terombang-ambing oleh kepentingan sekelompok pemilik modal. Sementara itu kekuatan lembaga-lembaga pemerintahan, yang seharusnya mengusahakan "*bonum communae*" akan terkooptasi oleh kepentingan para pemilik modal. Dengan demikian jumlah kelompok masyarakat yang bisa digolongkan "vulnerable" secara ekonomi terus bertambah dan semakin tidak punya daya resistensi terhadap dominasi para pemilik modal. Kemiskinan struktural semakin memprihatinkan. Kesenjangan sosial-ekonomi semakin tajam.

Dalam bidang kebudayaan, jika kita menilik lebih jauh, proses-proses marginalisasi budaya lokal, oleh kebudayaan yang cocok dengan kepentingan diseminasi pola kapitalisme liberal juga terjadi. Tersingkirnya bentuk-bentuk budaya tradisional oleh maraknya produksi dan reproduksi budaya massa merupakan bukti yang paling nyata betapa kekuatan kapital mampu menyingkirkan kebudayaan tradisional. Dengan demikian banyak kalangan masyarakat kita kehilangan bentuk-bentuk budaya tradisional dengan nilai-nilai dan keunggulan yang dikandungnya, dan beralih menjadi penikmat budaya-budaya virtual-digital yang miskin akan simbol dan fungsi pembatinaan nilainya. Selain itu adanya proses-proses deteritorialisasi kebudayaan sebagai

8 Bdk. Hana Panggabean dkk (ed.), *Kearifan Lokal Keunggulan Global* (Jakarta: Gramedia, 2014).

konsekuensi dari fenomena migrasi juga akan marak, utamanya di wilayah urban. Akibatnya fenomena “diskontinuitas” antara warisan budaya tradisional dengan pencarian bentuk-bentuk kebudayaan baru akan menimbulkan disorientasi budaya dan etika. Nilai-nilai, tradisi, atau pesan moral yang biasanya diusung oleh cetusan budaya tradisional seolah hilang begitu saja, sementara kita disuguhi bentuk-bentuk cetusan budaya baru dan nilai yang dikemasnya, yang sering kali tidak nyambung (diskontinuitas) dengan seperangkat nilai yang biasa menjadi orientasi hidup kita.

Fenomena yang sama juga bisa ditengarai dalam bidang sosial dan politik. Isu-isu terkait dengan hak azasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan manusia, pekerja migran dan perburuhan, perdagangan narkoba, kaum pengungsi, kiprah aneka lembaga swadaya masyarakat, tata kelola hukum, perlindungan kelompok minoritas, proses-proses demokratisasi merupakan wacana global yang tidak bisa dihindari menjadi wacana-wacana yang harus dihadapi dan digeluti oleh bangsa kita. Di satu pihak, globalisasi memberi pencerahan dan kesadaran baru bagi bangsa kita terhadap antara lain isu hak asasi manusia, kesadaran akan lingkungan hidup, dan terbangunnya jejaring lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Tetapi di lain pihak kita tidak bisa menutup diri terhadap keterlibatan komunitas masyarakat internasional terhadap masalah-masalah negeri kita. Reaksi dunia internasional terhadap fonis hukuman mati terhadap pengedar narkoba, penanganan yang lambat terhadap asap di Sumatra dan Kalimantan, terhadap hambatan yang dialami kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah, merupakan contoh konkret betapa apa yang sebelumnya bisa dianggap sebagai isue-isue domestik, tidak bisa lagi kita pandang sebagai masalah internal bangsa kita. Sementara itu cara kita mencari solusi terhadap masalah-masalah perdagangan manusia dan buruh migran mau tidak mau juga menuntut kita untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara lain yang terkait. Karena upaya negara kita untuk melindungi warganya, harus dibarengi dengan pemahaman akan sistem hukum negara dimana warga negara Indonesia sedang berada.

b. Demokratisasi yang belum Purna

Ketika perhatian kita kita arahkan pada kehidupan politik, salah satu

fenomena yang menyita energi bangsa kita adalah proses demokratisasi. Seiring dengan gerakan reformasi, menyusul runtuhnya dominasi rezim orde baru, dan seiring dengan gelombang globalisasi demokrasi, proses demokratisasi kehidupan politik semakin diyakini menjadi masa depan sistem politik di Indonesia. Kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya terus meningkat, keberanian kaum buruh, mahasiswa, kelompok minoritas dan tertindas untuk mengartikulasikan aspirasi mereka semakin dirasakan. Peran kritis dari media massa juga semakin diapresiasi. Namun proses menuju negara demokrasi bukan tanpa persoalan yang berarti. Ada banyak hambatan dan tantangan yang serius. Hambatan pertama, sebagaimana sudah disinyalir beberapa pengamat, adalah struktur sosial masyarakat kita, yang masih kental dengan pengaruh budaya feodalisme belum menyuguhkan fondasi yang memadai untuk membangun struktur sosial yang lebih egaliter, yang menjadi dasar kehidupan demokrasi di Indonesia.⁹ Struktur sosial masyarakat yang masih feodalistik ini juga merasuk ke dalam budaya politik dalam partai-partai politik dan institusi politik yang ada di negara kita. Itulah sebabnya, dalam semua partai politik unsur senioritas masih tetap menjadi dasar pertimbangan politis. Demikian juga, institusi-institusi politik kita sarat dengan politik dinasti. Kenyataan ini tidak lepas dari budaya dan struktur sosial yang masih feodalistik.

Rapuhnya lembaga-lembaga politik dan kehidupan partai politik, yang menghambat proses demokratisasi juga tidak lepas dari kebiasaan politik uang, permainan politik identitas, disorientasi ideologi, dan tiadanya kaderisasi dalam lembaga dan partai politik. Dengan kata lain pragmatisme politik membuat laju demokratisasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aneka bentuk pragmatisme politik, yang menghambat demokratisasi politik tersebut, telah terbukti merusak sendi-sendi kehidupan bersama, yakni benturan antar kelompok masyarakat, korupsi yang menggurita, sikap apatis terhadap demokrasi, ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga dan partai politik, munculnya pemimpin yang tidak punya wawasan dan orientasi

9 Robert W. Hefner, *Civil Islam: Moslem and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 215 bdk Adam Schwarcz, *A Nation in Waiting* (Colorado: Westview Press, 2000), 250.

ideologis dan kerakyatan. Ekses yang paling kentara dari pragmatisme politik yang terjadi di negara kita adalah potensi konflik antar akar rumput dan pemiskinan atau marginalisasi kaum miskin akibat kegaduhan politik. Sejauh struktur sosial, budaya feodal, dan pragmatisme politik tidak diubah, kepercayaan terhadap demokrasi semakin tipis, konflik sosial semakin marak, dan angka-kualitas kemiskinan akan terus bertambah.

c. *Korupsi yang Menggurita*

Indonesia masih termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Kejahatan korupsi masih terus saja menghiasi halaman muka media massa di negeri kita setiap hari. Kasus demi kasus terungkap, dan melibatkan orang dari hampir semua kalangan. Dari lingkungan kekuasaan mulai pusat sampai yang paling rendah. Kejahatan sosial ini melibatkan politikus, pemangku jabatan publik, pendidik, lembaga swadaya masyarakat, korporasi nasional maupun transnasional, bahkan mereka yang berada di dalam lembaga-lembaga keagamaan. Fenomena ini menandakan bahwa di negara kita kejahatan korupsi sudah merasuk di semua sektor kehidupan dan bisa melibatkan siapa saja. Objek korupsi tidak hanya uang atau materi tetapi juga kewenangan jabatan, waktu dan kesempatan, dan aneka akses yang memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan apapun bentuknya.

Tentu kita bisa mengidentifikasi aneka faktor yang turut mengkondisikan sehingga kejahatan korupsi menggurita di lingkungan kehidupan kita. Integritas atau disiplin diri yang rendah, di satu pihak, dan aneka kemungkinan yang disodorkan dalam kehidupan kita, di lain pihak, membuat banyak dari kita menempuh jalan pintas, mengambil apa yang mestinya bukan menjadi hak kita. Miskinnya integritas dan disiplin diri ini diperburuk oleh krisis kebudayaan yang disebabkan oleh modernisasi-globalisasi dan berkembangnya pragmatisme, yang berbuntut adanya disorientasi nilai dan idealisme. Sementara itu sistem pengawasan dan regulasi yang masih mudah dicari celahnya menyuburkan kejahatan sosial ini. Tambahan lagi, lembaga-lembaga yang mestinya menjaga disiplin dan kepatuhan sosial-hukum, seperti kepolisian-kejaksaan-kehakiman justru menjadi sarang korupsi.

Kejahatan korupsi ini tidak hanya terjadi secara intensif dan ekstensif, tetapi berlangsung turun temurun, melalui lembaga keluarga, lembaga pendidikan, komunitas sosial masyarakat, dan bahkan juga melalui lembaga-lembaga agama. Dengan demikian lembaga-lembaga yang mestinya menjadi tempat pembatinaan dan penerusan nilai, justru ikut tercemar menjadi lembaga dimana kejahatan korupsi ditradisikan. Karena tindakan korupsi bersifat masif dan berkelanjutan, kejahatan penyimpangan ini lambat laun dirasa sebagai sesuatu yang “normal”. Betapa kita menjadi terbiasa dengan tontonan dimana para pelaku korupsi muncul di media massa dengan senyum dan lambaian tangan seolah tak bersalah. Betapa kita menjadi familiar dengan berita bahwa para pelaku korupsi besar bisa menikmati kemudahan dan fasilitas istimewa di rumah tahanan. Betapa kita menjadi akrab dengan berita seorang tokoh besar, pengacara kondang, tiba-tiba terbongkar kejahatannya setelah puluhan tahun dikenal sebagai referensi dan pakar di dunia hukum. Rangkaian fenomena ini menunjukkan kepada kita betapa kejahatan korupsi menjadi sesuatu yang “normal”, dan masyarakat bisa bersikap “longgar” terhadap kejahatan ini. Di sini kita melihat adanya dekadensi standart atau cita rasa moral yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kebiasaan buruk atau bahkan kejahatan yang dalam perjalanan waktu menjadi “normal” karena dilakukan banyak pihak menjadi sumber kemerosotan standart moralitas dari komunitas masyarakat tersebut. Kita menyaksikan banalisasi kejahatan.

Konsekuensi berikutnya dari kejahatan korupsi adalah proses pemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan akal sehat kita bisa mengatakan bahwa yang paling mempunyai kesempatan korupsi besar adalah mereka yang mempunyai kewenangan dan otoritas karena jabatan publik seseorang. Karenanya tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut menyebabkan proses pemiskinan sistematis terhadap kelompok miskin dan marginal. Lebih jauh, sebagaimana belakangan ini terbukti, perilaku koruptif yang menjangkiti segala bidang kehidupan membuat sendi-sendi kehidupan perekonomian kita rapuh dan rentan terhadap guncangan. Dan ketika sendi-sendi kehidupan ekonomi kita rapuh dan rentan, lagi-lagi yang paling mungkin menjadi korban dan terinjak adalah kelompok miskin dan merjinal.

Dengan demikian tampaklah bahwa kejahatan korupsi yang merambah semua sektor dan lapisan kehidupan benar-benar bisa meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bersama sebagai bangsa. Masyarakat semakin terpecah-pecah, solidaritas dan semangat gotong royong menjadi mustahil. Potensi konflik karena kesenjangan tidak akan pernah berhenti. Kepercayaan satu sama lain yang merajut kehidupan bersama akan hilang. Institusi-institusi penyangga kehidupan sosial dan pelestarian nilai-nilai mengalami pembusukan. Inilah tantangan serius dan fundamental bagi kehidupan bangsa kita.

d. Ritualisme and Formalisme Agama

Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, kita kerap mencitrakan diri sebagai bangsa timur yang mempunyai kepribadian luhur, santun, punya semangat persaudaraan yang tinggi, dan mempunyai tradisi religius atau keagamaan yang kuat. Dalam kehidupan sehari-haripun kita bisa menyaksikan aneka bentuk pelaksanaan kewajiban dan ritual keagamaan yang dilakukan banyak orang dari beberapa tradisi agama yang ada di Indonesia. Pembangunan rumah ibadat bisa dijumpai dimana-mana, dari pusat sampai ke tempat-tempat pelosok. Upacara resmi keagamaan dilakukan di lembaga-lembaga publik, sekolah, dan komunitas-komunitas masyarakat. Kreatifitas masyarakat kita dalam mengembangkan dan “menginkulturasikan” upacara dan tradisi agama bisa dijumpai dalam semua tradisi agama yang hidup di Indonesia. Ada agama yang memberi tekanan pada pelaksanaan hukum dan praktek-praktek keagamaan yang bernuansa formalistis, namun banyak juga yang mendorong penghayatan agama jauh melampaui sifat ritualistik dan formalistik.

Namun di tengah-tengah semarak praktek kehidupan agama tersebut, kita juga menjumpai adanya fenomena yang memprihatinkan. Karena di satu pihak kita bisa merasakan suasana religius di berbagai lapisan kehidupan, tetapi di lain pihak kita masih menjumpai adanya korupsi, ketidakadilan, praktek hidup pragmatis-materialistis, dan kekerasan di banyak tempat. Di dalam kehidupan kita, kita mengalami dimana orang-orang yang kita anggap sebagai pemimpin, cendikiawan, bahkan agamawan ternyata terlibat dalam

kasus kekerasan dan korupsi. Kita menyaksikan aneka paradoks, di satu pihak kita melihat maraknya aneka produksi simbol-simbol dan ungkapan religius di masyarakat kita, namun di pihak lain praktek korupsi, kekerasan atas nama agama, ketidakadilan sosial juga tetap marak. Kita seolah menjadi bangsa yang mempunyai kepribadian ganda.

Selain faktor sistem dan penegak hukum, maraknya korupsi, sikap-sikap eksklusif, kekerasan atas nama agama, ketidakadilan sosial yang marak, tentu juga disebabkan penghayatan kehidupan agama yang berhenti pada praktek-praktek ritualistik dan formalistik. Kehidupan agama yang demikian tidak mampu mengembangkan kualitas moral, integritas diri, dan perilaku religius yang sejati dari para pemeluknya. Agama tidak mampu menjadi agen transformasi fundamental bagi para pemeluknya. Sebaliknya, kecenderungan penghayatan agama yang bersifat ritualistik dan formalistik, justru akan menjadikan agama sebagai lahan subur berkembangnya kapitalisme dan konsumerisme. Agama menjadi teman dan sahabat sejati dari kapitalisme dan konsumerisme. Selain itu, sebagaimana bisa kita tengarai, praktek kehidupan agama yang bersifat ritualistik dan formalistik juga menyebabkan agama menjadi rentan terhadap aneka manipulasi. Di tengah maraknya praktek politik identitas, para pemeluk agama direduksi sebagai komoditas politik, yang mudah dimobilisasi untuk kepentingan tertentu.

e. Penguatan Peran Negara dalam Institusi-Institusi Sosial dan Tuntutan Profesionalisme

Di tengah-tengah perjuangan berat dan aneka kendala pemerintah dalam membangun kesejahteraan rakyatnya, harus diakui disana-sini bahwa pemerintah semakin hadir dalam mengembangkan lembaga dan sarana-sarana yang menunjang kemajuan dan kesejahteraan warganya. Sebelumnya, lembaga-lembaga pelayanan masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, dan aneka lembaga pemberdayaan masyarakat, yang belum ditangani oleh pemerintah, diambil alih oleh lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga swasta dengan maksud untuk pengisi peran-peran yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemerintah. Dalam perjalanan waktu banyak lembaga keagamaan, yang semula menekuni bentuk-bentuk pelayanan yang sifatnya

membantu apa yang belum mampu disediakan oleh pemerintah seperti rumah sakit dan sekolah, serta aneka lembaga pelatihan, juga memperoleh sumber hidupnya dari ketekunanya mengembangkan lembaga-lembaga tersebut.

Namun ketika peran dan komitmen pemerintah semakin baik, dan kemampuan pemerintah untuk mendanai karya-karya pengembangan masyarakat semakin meningkat, lembaga-lembaga keagamaan yang terbiasa mendapat sumber hidupnya juga dari pelayanan menekuni lembaga-lembaga semacam itu mulai mengalami kesulitan. Lebih-lebih, seiring dengan kemajuan zaman dan gelombang globalisasi tuntutan profesionalisme dan daya kompetitif lembaga-lembaga semacam itu semakin dibutuhkan. Karya-karya pengembangan masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit dihadapkan pada tuntutan profesionalisme, yang sering kali harus mengikuti prinsip-prinsip kerja dan tata kelola yang berorientasi komersial. Di lingkungan lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga sosial nirlaba, demi tuntutan untuk bisa bertahan hidup seringkali misi harus beralih menjadi profesi, apalagi kalau ketahanan lembaga-lembaga keagamaan dan nirlaba dalam menjaga komitmennya tidak sebanding dengan gelombang komersialisasi dan kapitalisasi bidang-bidang pelayanan yang sedang digelutinya.

MENJADI GEREJA YANG GEMBIRA DAN BERBELASKASIH

Berhadapan dengan fenomena konkret yang dominan tersebut, bagaimana Gereja Katolik di Indonesia bisa menghadirkan wajah Gereja yang gembira dan berbelaskasih? Bagaimana mengubah wajah Gereja yang mungkin masih terkesan eksklusif, institusionalistik, cenderung ketat terhadap aturan dan hukum, dan mungkin juga menjadi komunitas religius yang elitis, kaya dan dekat dengan lapisan masyarakat atas? Bagaimana Gereja mampu mengambil peran untuk mengubah kondisi masyarakat yang hidup dengan harapan, menumbuhkan budaya cinta dan solidaritas, mengembangkan sikap-sikap inklusif dan belarasa?

Menurut hemat penulis, cita-cita menjadi Gereja yang gembira dan berbelaskasih memang harus diterjemahkan ke dalam upaya-upaya strategis dan operasional, yang membawa pada perubahan diri Gereja dan juga

perubahan masyarakat. Berikut ini beberapa pemikiran penulis, bertolak dari realitas kehidupan masyarakat di Indonesia. *Pertama*, di tengah-tengah aneka pengaruh yang mereduksi nilai luhur manusia semata-mata sebagai alat produksi dan konsumen, yang merendahkan martabat manusia karena orientasi materialisme dan hedonisme, maka Gereja perlu terus menerus mencari cara yang efektif untuk melindungi dan mengartikulasikan keluhuran martabat manusia. Gereja Perlu terus menerus merenungkan pandangannya yang luhur dan utuh tentang manusia, dan merumuskannya dalam kategori-kategori atau istilah-istilah yang bisa dipahami dan menyapa manusia dewasa ini. Baru ketika manusia diingatkan terus menerus akan nilai dan martabat dirinya, dia akan mampu memahami dan membahasakan kerinduan-kerinduan yang sebenarnya terus bersuara di dalam dirinya, tetapi dengan berbagai cara “digaduhkan” oleh pandangan ideologis, kenyataan dan gaya hidup, dan aneka pendapat yang membuat mereka mengalami disorientasi dan keterasingan. Manusia gembira, adalah manusia yang mampu memahami sekaligus memenuhi apa yang menjadi kerinduannya yang terdalam.

Kedua, kita juga dihadapkan akan adanya proses-proses fragmentasi kehidupan manusia. Polarisasi kelompok kaya dan miskin akibat sistem ekonomi “pengecualian,” dengan segala akibatnya yang kompleks seperti sikap eksklusif antar kelompok, akan terus berlangsung. Ketegangan dan konflik antar kelompok, karena absennya kohesitas sosial tradisional (budaya), karena krisis identitas -yang dibarengi dengan reaksi terhadap nilai-nilai hidup baru (materialisme-hedonisme) yang kemudian memicu tumbuhnya kelompok fundamentalisme, masih akan terus membayangi. Atomisasi lembaga keluarga dan komunitas patembayan yang lebih luas, karena migrasi dan urbanisasi demi alasan pekerjaan, akan terus berkembang. Di tengah laju proses fragmentasi kehidupan manusia semacam ini, Gereja perlu tetap meyakini relevansi dan mewujudkan panggialnya, yaitu menjadi jembatan dan mediator yang menghubungkan pihak atau kelompok yang tercerai berai. Gereja perlu terus menerus mengusahakan berkembangnya sikap-sikap inklusif antar kelompok masyarakat. Sikap inklusif inilah yang akan menggerakkan orang untuk menunjukkan sikap bela rasa dan belas kasih.

Ketiga, banyak bentuk-bentuk “rekayasa” sosial mengandaikan adanya partisipasi di ruang publik-politik. Ketika kita dihadapkan pada

kenyataan, di satu pihak struktur sosial masyarakat kita belum sepenuhnya berciri egaliter, sementara itu, di lain pihak, bangsa kita punya komitmen untuk membangun sistem demokrasi sebagai tata hidup negara kita, kita dituntut untuk mengembangkan struktur sosial yang semakin egaliter. Juga ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa lembaga-lembaga pelayanan kita, seperti sekolah dan rumah sakit, semakin kesulitan untuk mempertahankan hidupnya, kita disadarkan akan perlunya partisipasi politik sehingga kita punya akses ke proses pengambilan keputusan. Namun, sayangnya, partisipasi politik anggota Gereja cenderung menurun. Karena itu, jika Gereja ingin lebih berpartisipasi dalam membangun kehidupan demokrasi yang dewasa, ingin tetap terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan publik, ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan kehidupan ekonomi yang berorientasi kerakyatan, kita tidak boleh keluar dari arena kehidupan politik. Menghadirkan Gereja gembira dan berbelaskasih tidak mungkin tanpa usaha-usaha partisipasi politik.

Keempat, fenomena kehidupan kita memberi signal bahwa bangsa kita bisa terperosok menjadi bangsa berkepribadian ganda. Ritualisme dan formalisme kehidupan beragama begitu marak, tetapi pada saat yang sama kita juga menjadi bangsa yang terkorup, kerusakan dan kekerasan sosial atas nama agama dan etnis juga terjadi di banyak tempat hingga hari ini, penghargaan terhadap hak dan nilai hidup orang lain juga masih rendah. Tindakan-tindakan diskriminatif di sana sini juga belum berakhir. Dihadapkan pada situasi paradoks semacam ini, Gereja perlu sungguh-sungguh mengembangkan usaha-usaha untuk membangun spiritualitas agama yang mampu mengubah secara fundamental kehidupan umatnya.

Kepustakaan

Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*, New York: A Harvest Book, 1968

Fransiskus. *Evangelii Gaudium (Seruan Apostolik Paus Fransiskus 24 November 2013) (terj.)*, Jakarta: Dokpen KWI, 2014

Fransiscus. *Misericordie Vultus (Bull of Indiction of The extraordinary Jubilee of Mercy, April 11, 2014)*

Hefner, Robert W. *Civil Islam: Moslems and Democratization in Indonesia*, Princeton: Princeton University Press, 2000

Panggabean, Hana dkk (ed.). *Kearifan Lokal Keunggulan Global*, Jakarta: Gramedia, 2014

Schwartz, Adam. *A Nation in Waiting*, Colorado: Westview Press, 2000

Tomlinson, John. *Globalization and Culture*, Cambridge: Polity Press, 1999

